



SAMPUL





SK





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Papua Tahun 2025—2029 dapat disusun dan diselaraskan dengan baik. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025—2029 sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025—2029.

Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Papua selama periode 2020—2024, agar lebih responsif terhadap dinamika situasi, kondisi, dan kebijakan kebahasaan di Tanah Papua. Inovasi dan strategi pelaksanaan program serta anggaran disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga mampu menjawab tantangan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Papua.

Melalui empat prioritas kebijakan kebahasaan dan kesastraan, yaitu (1) Peningkatan Kecakapan Literasi, (2) Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia, (3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, serta (4) Penginternasionalan Bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Papua berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional. Dengan demikian, program dan kegiatan kebahasaan di Papua diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Papua Tahun 2025—2029 ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Papua sehingga upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dapat dilaksanakan dengan lebih terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

Jayapura, Oktober 2025

Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua,

Valentina Lovina Tanate, M.Hum.

NIP 196906122003122001





DAFTAR ISI





BAB I PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multibahasa dengan satu bahasa nasional (bahasa Indonesia), 718 bahasa daerah, dan puluhan bahasa asing. Keberagaman bahasa ini merupakan kekayaan dan modal sosial yang sangat berharga bagi bangsa berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa. Dalam konteks Papua, keberagaman bahasa daerah menjadi salah satu ciri khas yang meneguhkan identitas kultural dan sosial masyarakatnya. Di Tanah Papua sendiri terdapat 428 bahasa daerah, menjadikannya kawasan dengan keragaman bahasa terbanyak di Indonesia. Bahasa-bahasa daerah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas, pewaris nilai budaya, serta media pendidikan informal di tengah komunitas.

Namun, di balik potensi tersebut, terdapat tantangan besar berupa risiko keterpinggiran bahkan kepunahan bahasa daerah karena berkurangnya jumlah penutur aktif, dominasi bahasa mayoritas, dan keterbatasan dokumentasi serta pelestarian. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan bahasa yang terpadu dan berkelanjutan, agar bahasa Indonesia tetap mantap sebagai pemersatu, bahasa daerah terjaga sebagai akar identitas keindonesiaan, dan bahasa asing dikuasai untuk memperkuat daya saing global. Prinsip Trigatra Bangun Bahasa—*Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing*—menjadi pedoman utama dalam pengelolaan kebahasaan di Papua.

Bahasa Indonesia perlu terus diperkuat di Tanah Papua agar semakin berperan sebagai sarana komunikasi lintas budaya dan pemersatu keragaman etnis. Pada saat yang sama, bahasa-bahasa daerah di Tanah Papua perlu didokumentasikan, dibina, dan dilestarikan agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Sementara itu, penguasaan bahasa asing, terutama bahasa internasional, perlu difasilitasi untuk membuka akses lebih luas bagi generasi muda Papua dalam dunia pendidikan, teknologi, seni, dan diplomasi global.

Balai Bahasa Provinsi Papua sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengemban peran strategis dalam pembangunan kebahasaan dan kesastraan di Tanah Papua. Tugas ini mencakup pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa serta penguatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Balai Bahasa juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan bahasa Indonesia di dalam negeri melalui fasilitasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, lembaga pendidikan, dan ranah strategis lainnya. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki mandat untuk melestarikan bahasa daerah yang menjadi identitas masyarakat Papua melalui dokumentasi dan revitalisasi bahasa. Upaya ini sekaligus mendukung keberlanjutan kebudayaan lokal dan memperkuat ketahanan budaya nasional. Di sisi lain, pengembangan program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di Papua berkontribusi pada diplomasi kebahasaan dan memperkenalkan Papua serta Indonesia di kancah internasional.

Dengan demikian, Balai Bahasa Provinsi Papua tidak hanya berfungsi sebagai penopang kedaulatan bahasa dan identitas bangsa, tetapi juga sebagai penggerak utama kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Papua.





Melalui strategi pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang sistematis, bertahap, dan berkelanjutan, Balai Bahasa Provinsi Papua berkomitmen untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul, inklusif, serta berdaya saing, sekaligus menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai instansi yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengelola bahasa dan sastra, Balai Bahasa Provinsi Papua berkewajiban menyusun rencana strategis pembangunan kebahasaan dan kesastraan di tingkat provinsi secara komprehensif. Rencana strategis ini mencakup upaya pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, pelestarian bahasa daerah Papua yang sangat beragam (sebanyak 428 bahasa daerah), serta fasilitasi penguasaan bahasa asing guna meningkatkan daya saing generasi muda Papua di tingkat nasional maupun global.

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Papua tahun 2025—2029 disusun selaras dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025—2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, Asta Cita Presiden terpilih 2025—2029, prioritas dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025—2029, serta prioritas dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2025—2029.

Sebagai bagian dari penyusunan Renstra tersebut, Balai Bahasa Provinsi Papua perlu mengemukakan kondisi umum, potensi, serta permasalahan kebahasaan dan kesastraan di wilayah Papua, yang mencakup aspek pematapan fungsi bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah yang terancam punah, serta pengembangan program kebahasaan dan kesastraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja 2020—2024

Pembangunan kebahasaan dan kesastraan di Tanah Papua dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam konteks geografis, sosial, dan budaya Papua yang sangat beragam. Permasalahan utama, seperti rendahnya tingkat literasi, ancaman kepunahan bahasa daerah, serta belum optimalnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa internasional, ditangani melalui berbagai program berkesinambungan.

Pada periode pembangunan kebahasaan dan kesastraan tahun 2020—2024, Balai Bahasa Provinsi Papua melaksanakan tiga program prioritas, yaitu:

1. Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan, untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Papua melalui pemberian layanan kebahasaan, pemberdayaan komunitas literasi, peningkatan kemahiran berbahasa, pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI), pemilihan duta bahasa, dan pembinaan literasi generasi muda.
2. Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, untuk mendokumentasikan, menginventarisasi, serta menghidupkan kembali bahasa dan sastra daerah Papua yang terancam punah agar tetap terpelihara dan diwariskan kepada generasi berikut.





3. Internasionalisasi Bahasa Indonesia, untuk mendukung pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, memperkuat peran bahasa Indonesia di forum nasional maupun internasional, serta menjadikan Papua sebagai salah satu etalase pemajuan bahasa Indonesia di kawasan timur Indonesia.

Capaian pembangunan kebahasaan dan kesastraan dari tiga program prioritas tersebut di wilayah Papua dirangkum dalam berbagai kegiatan yang menyentuh masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas budaya, dan mitra strategis lainnya.

Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

- 176 Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina
- 2.424 Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra
- 8 Produk Kesastraan Berkembang (buku cerita anak)
- 11.978 penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
- 45 lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
- 87 komunitas penggerak literasi yang terbina
- 57 produk penerjemahan

Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD)

- 180 Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah
- 360 Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah
- 8 produk pengembangan bahasa dan sastra (produk kodifikasi dan kamus dwibahasa)
- 1.158 Partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah

Internasionalisasi Bahasa Indonesia

- 23 Lembaga BIPA
- 112 Pemelajar BIPA

Selain capaian tersebut, Balai Bahasa Provinsi Papua juga menguraikan capaian tiga program prioritas dari perspektif sasaran kegiatan. Capaian ini tercermin dalam target dan realisasi tiap indikator kinerja kegiatan yang disajikan secara bersamaan sehingga persentase ketercapaiannya dapat diketahui secara jelas.

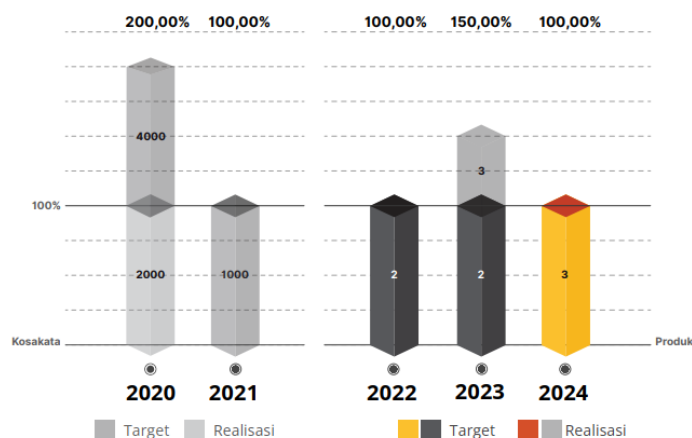
SK 1 Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra. Beberapa aktivitas yang mendukung sasaran kegiatan pertama, antara lain

1. Pemerayaan Kosakata melalui tahapan Inventarisasi atau pengumpulan data kosakata bahasa daerah, Lokakarya Kosakata Bahasa Daerah (LKBD), dan Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD).
2. Pengembangan kamus dengan menyusun kamus dwibahasa (bahasa daerah–bahasa Indonesia) yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.

Tren Capaian
Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra
2020—2024





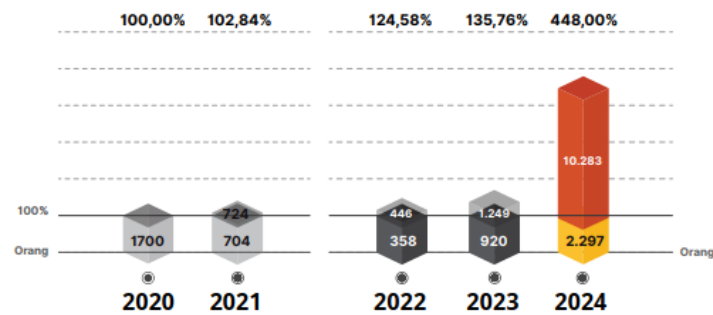
SK 2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan. Beberapa aktivitas yang mendukung sasaran kegiatan kedua, antara lain

1. Peningkatan Kemahiran Berbahasa dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi guru, siswa, tenaga kependidikan, aparatur pemerintah daerah, serta masyarakat umum.
2. Peningkatan Apresiasi Sastra diwujudkan melalui pertunjukan sastra, seperti bengkel sastra dan musikalisasi puisi..
3. Pembinaan Masyarakat dalam Rangka Bulan Bahasa dilaksanakan melalui seminar, gelar wicara, lomba, dan pameran literasi.
4. Pelaksanaan UKBI Adaptif diselenggarakan secara berkala di sekolah, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah/swasta serta memfasilitasi peserta didik, guru, dan aparatur sipil negara di Tanah Papua sebagai tolok ukur kemahiran berbahasa Indonesia.
5. Pemilihan Duta Bahasa Penggerak Literasi dilaksanakan melalui ajang tingkat Papua untuk menjaring generasi muda yang peduli terhadap bahasa dan sastra.
6. Pembinaan Literasi Generasi Muda dilakukan melalui Krida Duta Bahasa, yaitu rangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bahasa negara dan bahasa daerah.

Tren Capaian
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
dalam Gerakan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan
2020—2024



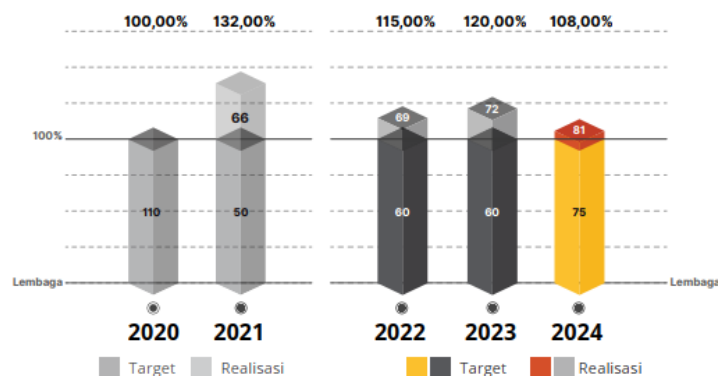


SK 3 Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya dan Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina. Beberapa aktivitas yang mendukung sasaran kegiatan ketiga, antara lain

1. Pelaksanaan Pembinaan Bahasa pada Lembaga bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa pada lembaga.
2. Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi dalam bentuk Pemutakhiran Profil Komunitas, Bimbingan Teknis Komunitas Literasi, dan Fasilitasi Komunitas Literasi.

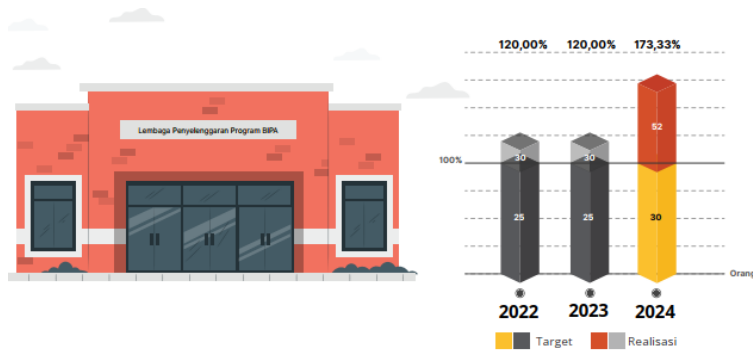
Tren Capaian
Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
2020—2024



SK 4 Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA

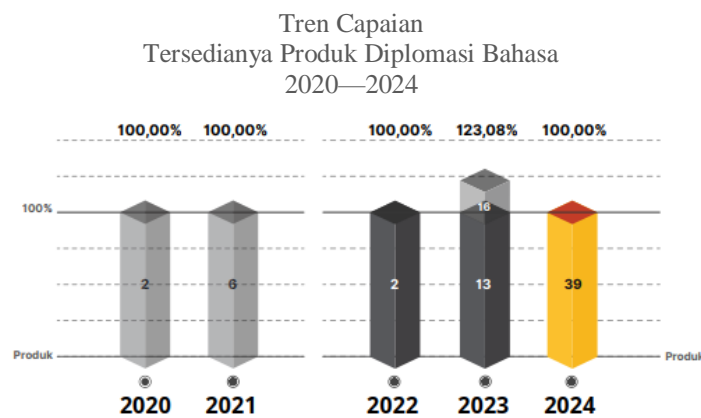
Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA). Beberapa aktivitas yang mendukung sasaran kegiatan keempat, antara lain Bimbingan Teknis Program BIPA, Forum Ilmiah Ke-BIPA-an, dan Pemasarakatan Program BIPA

Tren Capaian
Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA
2022—2024



SK 5 Tersedianya Produk Diplomas Bahasa

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah produk penerjemahan. Aktivitas yang mendukung sasaran kegiatan kelima adalah penyusunan buku cerita anak berbasis STEAM melalui proses penulisan karya berbasis daerah, penerjemahan, ilustrasi, penyuntingan, dan uji keterbacaan.



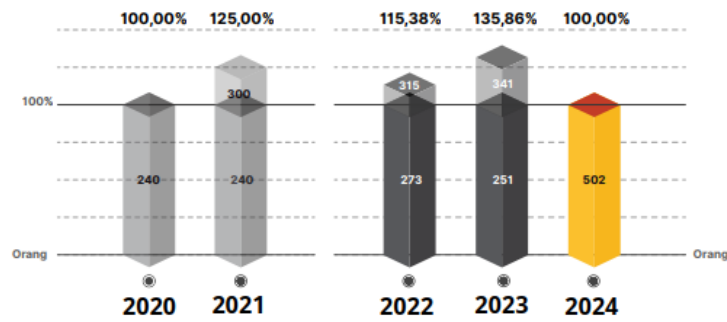
SK 6 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah. Beberapa aktivitas yang mendukung sasaran kegiatan keenam, antara lain

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD).
2. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Bahan Ajar RBD.
3. Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah.
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah.
5. Festival Tunas Bahasa Ibu.

Tren Capaian Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra 2020—2024

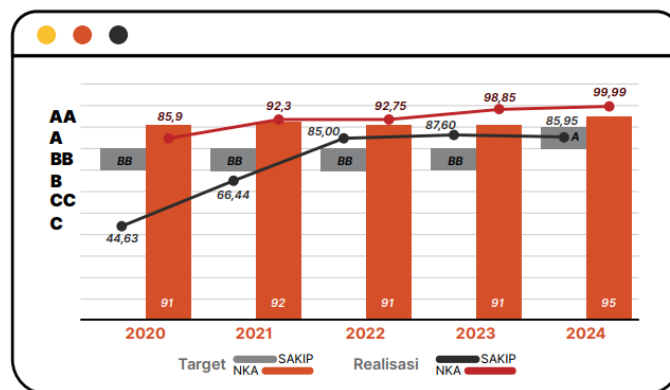




SK 7 Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Papua

Sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Papua dan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Papua. Aktivitas yang mendukung sasaran kegiatan ketujuh adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta evaluasi kinerja anggaran secara baik dan sesuai ketentuan berlaku.

Tren Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Papua
2020—2024



1.1.2 Aspirasi Masyarakat

Rekomendasi Konsolidasi Regional Se-Tanah Papua 2025

Dalam konteks penyelenggaraan Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Tanah Papua Tahun 2025 dengan tema *Sinergi Semesta dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Tanah Papua*, Balai Bahasa Provinsi Papua, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengemban amanat untuk mengampu topik “Kedaulatan Bahasa Indonesia dan Revitalisasi Bahasa Daerah”. Topik ini dijabarkan dalam dua subfokus kebijakan utama, yaitu (1) Penguatan Kedaulatan Bahasa Indonesia. (2) peningkatan literasi berbasis bahasa dan sastra, dan (3) Penguatan Revitalisasi Bahasa Daerah.

Ketiga agenda tersebut dirumuskan dengan mengacu pada arah kebijakan RPJPN 2025—2045, agenda prioritas Asta Cita Pemerintahan Prabowo—Gibran, serta visi pembangunan pendidikan nasional yang menekankan pentingnya pendidikan inklusif, kontekstual, dan berkarakter.





Agenda pertama, kedaulatan bahasa Indonesia, diarahkan pada penguatan posisi bahasa negara melalui pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen resmi serta pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai standar nasional. Di Tanah Papua, agenda ini menjadi penting karena keragaman bahasa daerah menuntut hadirnya bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu tanpa menegasikan kekayaan lokal.

Agenda kedua, peningkatan literasi berbasis bahasa dan sastra, difokuskan pada peningkatan kompetensi berbahasa bagi guru, penyediaan bahan bacaan bermutu dalam berbagai format (cetak maupun digital), serta pelibatan komunitas literasi untuk menumbuhkan pemahaman membaca yang bermakna. Dalam forum konsolidasi, peserta menekankan bahwa literasi perlu dikaitkan dengan kearifan lokal Papua, misalnya melalui dongeng, cerita rakyat, dan sastra daerah, agar lebih kontekstual dan mudah diterima oleh peserta didik.

Agenda ketiga, penguatan revitalisasi bahasa daerah, diarahkan pada penyusunan regulasi daerah (termasuk usulan Peraturan Daerah Khusus/Perdasus) tentang perlindungan dan penggunaan bahasa daerah di lembaga pendidikan, keagamaan, dan pemerintahan. Selain itu, upaya ini juga mencakup pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis bahasa daerah, pemberdayaan komunitas dan maestro bahasa/sastra daerah, serta pelibatan generasi muda melalui Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI). Untuk Papua tahun 2025, bahasa Tehit, Kimaghima, Mairasi, dan Yaur menjadi target prioritas revitalisasi.

Hasil sidang komisi secara umum merekomendasikan agar isu kebahasaan dijadikan bagian integral dari pembangunan pendidikan di Tanah Papua, antara lain melalui pengarusutamaan dalam RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan, hingga kebijakan afirmatif di tingkat daerah. Dengan demikian, penguatan bahasa Indonesia, literasi, dan revitalisasi bahasa daerah tidak hanya menjadi program sektoral, tetapi juga tumpuan strategis untuk membentuk generasi Papua yang cerdas, berkarakter, serta bangga akan identitas budaya dan kebangsaannya.

1. Penguatan Kedaulatan Bahasa Indonesia
 - a. Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia perlu diperkuat, khususnya di ruang pendidikan, lembaga pemerintah, dan ruang publik agar bahasa Indonesia menjadi perekat kebangsaan di tengah keragaman sosial-kebahasaan.
 - b. Program kebahasaan di daerah harus diprioritaskan dalam RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebudayaan sehingga ada keselarasan dengan kebijakan nasional.
 - c. Kampanye publik tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan harus digalakkan, misalnya melalui media lokal, kegiatan sekolah, dan komunitas.
2. Peningkatan Literasi Berbasis Bahasa dan Sastra
 - a. Penguatan literasi berbasis bahasa Indonesia dan sastra daerah di sekolah melalui kurikulum muatan lokal, lomba literasi, festival bahasa dan sastra, serta produksi bahan bacaan yang kontekstual dengan budaya Papua.





- b. Pemerataan akses pendidikan bermutu untuk anak-anak dari berbagai latar bahasa (Indonesia maupun bahasa daerah) agar kemampuan literasi tidak timpang.
 - c. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan komunitas budaya untuk mendorong kegiatan literasi berbasis bahasa dan sastra di luar sekolah.
3. Penguatan Revitalisasi Bahasa Daerah
 - a. Penyusunan Peraturan Daerah Khusus untuk pelestarian bahasa daerah yang mengatur penggunaannya di lembaga pendidikan, pemerintahan, dan institusi sosial.
 - b. Hari wajib berbahasa daerah di sekolah dan kantor pemerintah sebagai bentuk revitalisasi nyata.
 - c. Penganggaran khusus untuk revitalisasi bahasa daerah, termasuk dokumentasi, pembelajaran intergenerasional (melibatkan penutur asli dan generasi muda), serta teknologi digital (aplikasi kamus, media pembelajaran daring).
 - d. Kerja sama lintas sektor (pendidikan, kebudayaan, pemerintah daerah, dan komunitas adat) untuk memperlambat laju kepunahan bahasa daerah di Papua.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pembangunan kebahasaan dan kesastraan di Tanah Papua selama periode 2020—2024 telah menunjukkan capaian positif melalui pelaksanaan program prioritas nasional, meliputi penguatan literasi berbasis bahasa dan sastra, revitalisasi bahasa daerah, dan pemertabatan bahasa Indonesia. Namun, luasnya cakupan wilayah kerja di Tanah Papua yang meliputi enam provinsi, keberagaman bahasa, serta tantangan geografis memerlukan strategi yang lebih masif dan berdampak nyata. Untuk dapat mengidentifikasi Potensi dan Permasalahan yang ada, maka dilakukan analisis berbagai faktor sebagai berikut

Faktor Internal

1. Kekuatan
 - a. Mandat kelembagaan yang jelas sebagai UPT Badan Bahasa di wilayah Papua.
 - b. Cakupan wilayah kerja yang luas, mencakup enam provinsi hasil pemekaran Papua, memberi peluang besar untuk intervensi kebahasaan dan kesastraan.
 - c. SDM berkompeten yang didukung jejaring mitra lokal (guru, komunitas literasi, duta bahasa, dan tokoh adat).
 - d. Kekayaan bahasa daerah (428 bahasa daerah di Tanah Papua) sebagai modal budaya dan riset kebahasaan.
 - e. Kehadiran program revitalisasi bahasa daerah (RBD) yang mendapat dukungan komunitas dan sekolah.
 - f. Portofolio kegiatan literasi berbasis bahasa dan sastra yang variatif, seperti Pemilihan Duta Bahasa, Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), dan berbagai pelatihan literasi.
 - g. Transformasi digital mulai diterapkan, misalnya melalui penggunaan aplikasi dan media sosial untuk sosialisasi kebahasaan.
2. Kelemahan
 - a. Keterbatasan jumlah SDM Balai Bahasa dibandingkan luasnya cakupan enam provinsi.





- b. Masih rendahnya pemanfaatan produk kebahasaan (misalnya UKBI, bahan bacaan) di daerah terpencil.
- c. Belum adanya balai bahasa definitif di Provinsi Papua Barat dan empat provinsi baru di Tanah Papua (Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya).
- d. Anggaran terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah kerja dan pelibatan komunitas bahasa yang lebih luas.
- e. Peningkatan kompetensi guru utama untuk mengajarkan bahasa daerah masih belum merata.

Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. Dukungan RPJPN 2025—2045 dan RPJMN 2025–2029 terhadap pembangunan kebahasaan.
- b. Meningkatnya kesadaran publik Papua terhadap pentingnya pelestarian bahasa daerah sebagai identitas budaya.
- c. Dukungan dari komunitas adat, gereja, dan tokoh masyarakat dalam penggunaan bahasa daerah di ruang sosial dan pendidikan.
- d. Tumbuhnya komunitas literasi lokal, sekolah adat, serta organisasi pemuda Papua yang bergerak di bidang bahasa dan sastra.
- e. Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) mendapat dukungan luas dari pemerintah daerah.
- f. Bahasa Indonesia semakin dibutuhkan sebagai bahasa pengantar pendidikan dan komunikasi lintas suku di Papua.
- g. Potensi kerja sama dengan universitas, lembaga riset, dan mitra pembangunan internasional untuk perlindungan bahasa daerah dan literasi.

2. Ancaman

- a. Ancaman kepunahan bahasa daerah akibat berkurangnya penutur jati di banyak wilayah.
- b. Dominasi bahasa asing (terutama Inggris) di media dan ruang digital yang memengaruhi generasi muda.
- c. Rendahnya komitmen sebagian pemerintah daerah dalam mendukung program kebahasaan.
- d. Kesenjangan akses pendidikan dan teknologi di wilayah 3T yang berdampak pada rendahnya kompetensi literasi.
- e. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya kemampuan literasi dasar di beberapa wilayah Papua.
- f. Ancaman peretasan atau disinformasi yang dapat mengganggu platform digital kebahasaan.
- g. Menurunnya sikap positif sebagian penutur terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

1.2.1 Potensi

Setelah dilakukan analisis SWOT terhadap Balai Bahasa Provinsi Papua yang mencakup faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman), dapat diidentifikasi sejumlah potensi yang dimiliki Balai Bahasa Provinsi Papua. Potensi tersebut muncul dari perpaduan antara kekuatan





internal yang sudah ada dan peluang eksternal yang terbuka lebar sehingga memberikan dasar yang kokoh bagi Balai Bahasa untuk mengembangkan program kebahasaan dan kesastraan secara lebih efektif. Berikut potensi yang dimiliki Balai Bahasa Provinsi Papua.

1. Mandat kelembagaan yang jelas sebagai UPT Badan Bahasa

Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki potensi besar karena telah mendapatkan legitimasi formal sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan program kebahasaan dan kesastraan di wilayah Papua. Legitimasi kelembagaan ini tidak hanya menegaskan posisi Balai sebagai perpanjangan tangan negara dalam perlindungan bahasa dan sastra, tetapi juga memberikan kekuatan advokasi yang kokoh dalam menjalin hubungan dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas lokal, maupun mitra strategis lainnya. Dengan dasar legalitas tersebut, setiap program yang dijalankan tidak lagi dipandang sekadar sebagai kegiatan proyek jangka pendek, melainkan sebagai amanat negara yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan manusia dan kebudayaan. Hal ini sekaligus memperkuat kredibilitas Balai Bahasa Provinsi Papua di mata publik, membuka ruang kerja sama yang lebih luas, serta memastikan keberlanjutan program kebahasaan dan kesastraan di Tanah Papua.

2. Cakupan wilayah kerja luas (enam provinsi hasil pemekaran)

Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki potensi strategis karena menjadi satu-satunya lembaga kebahasaan yang memiliki otoritas di seluruh Tanah Papua. Posisi ini menjadikannya sebagai pusat berbagai program kebahasaan lintas provinsi, baik dalam hal pemetaan bahasa, pengembangan literasi lokal, maupun pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah sehingga upaya perlindungan dan pengembangan bahasa dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak luas.

3. Jejaring lokal (guru, komunitas, duta bahasa, tokoh adat)

Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki potensi besar melalui dukungan sosial yang kuat dari jejaring masyarakat, yang memungkinkan penyebaran program kebahasaan berjalan lebih cepat tanpa harus selalu bergantung pada anggaran besar. Dukungan ini membuka peluang terciptanya gerakan kebahasaan berbasis masyarakat, di mana komunitas lokal menjadi penggerak utama sehingga program yang dijalankan tidak hanya efektif, tetapi juga lebih berkelanjutan.

4. Kekayaan bahasa daerah (428 bahasa daerah)

Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki potensi untuk berkembang sebagai laboratorium kebahasaan terbesar di Indonesia bahkan dunia, mengingat kekayaan bahasa daerah yang dimilikinya. Potensi ini dapat menarik kerja sama bidang kebahasaan dan kesastraan baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus melahirkan berbagai produk budaya seperti kamus, cerita rakyat, dan dokumentasi bahasa yang bernilai tinggi. Hasil-hasil tersebut tidak hanya bermanfaat dalam bidang pendidikan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi budaya yang memperkuat identitas Papua di kancah global.

5. Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD)

Program revitalisasi bahasa daerah yang dijalankan Balai Bahasa Provinsi Papua telah memiliki potensi besar karena sudah mendapat dukungan luas dari komunitas, sekolah, dan pemerintah daerah. Dukungan ini menjadikannya sebagai pintu masuk bagi kolaborasi lintas sektor, baik dengan dinas





pendidikan, organisasi adat, gereja, maupun perguruan tinggi. Lebih jauh, program ini dapat dikembangkan ke arah penyusunan kurikulum muatan lokal atau pelatihan guru bahasa daerah sehingga upaya perlindungan dan pengembangan bahasa tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga terintegrasi dalam sistem pendidikan dan keberlanjutan masyarakat.

6. Portofolio kegiatan literasi

Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki potensi untuk membentuk ekosistem literasi yang beragam dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, guru, hingga komunitas. Keberagaman ini tidak hanya memperluas jangkauan program literasi, tetapi juga meningkatkan profil Balai Bahasa di mata publik sebagai pusat kreativitas dan penggerak budaya literasi, bukan sekadar lembaga birokrasi.

7. Transformasi digital

Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki potensi besar melalui pemanfaatan aplikasi dan media sosial yang mampu memperluas jangkauan program hingga ke daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempermudah sosialisasi, tetapi juga mendorong proses digitalisasi bahasa daerah dalam berbagai bentuk, seperti konten audio-visual, kamus digital, dan aplikasi pembelajaran. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa, dengan menghadirkan bahasa daerah dalam ruang digital yang dekat dengan generasi muda.

8. Dukungan kebijakan nasional (RPJPN 2025—2045, RPJMN 2025—2029)

Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki potensi yang kuat karena arah pembangunan nasional menempatkan perlindungan bahasa sebagai bagian penting dari pembangunan manusia dan kebudayaan. Dukungan kebijakan ini memberikan landasan yang kokoh bagi keberlanjutan program kebahasaan, sekaligus membuka peluang untuk memperoleh akses anggaran tambahan dari pemerintah pusat maupun menjalin kerja sama yang lebih luas dengan pemerintah daerah.

9. Meningkatnya kesadaran masyarakat Papua terhadap bahasa daerah

Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki potensi besar karena adanya dorongan kuat dari masyarakat untuk melestarikan bahasa daerah. Dukungan ini menjadi modal sosial yang sangat penting, sebab program Balai tidak berjalan sendiri, melainkan ditopang oleh gerakan masyarakat yang melibatkan komunitas adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemuda. Kehadiran berbagai elemen masyarakat tersebut memberikan legitimasi kultural sekaligus memperluas jangkauan pelaksanaan program dan menjadikan upaya perlindungan bahasa lebih hidup, partisipatif, dan berkesinambungan, karena tumbuh dari kesadaran bersama bahwa bahasa daerah adalah identitas dan warisan budaya yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Dengan demikian, Balai Bahasa Provinsi Papua tidak hanya berperan sebagai penggerak utama, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan perlindungan bahasa di tingkat nasional.

10. Pertumbuhan komunitas literasi, sekolah adat, organisasi pemuda

Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki potensi melalui basis pelibatan anak muda dan komunitas dalam kegiatan literasi. Keterlibatan generasi muda ini membuka jalur regenerasi yang penting





sehingga upaya perlindungan bahasa daerah tidak hanya bergantung pada generasi tua, tetapi juga diwariskan dan dijaga keberlanjutannya oleh generasi penerus.

11. Bahasa Indonesia semakin dibutuhkan sebagai pengantar lintas suku

Papua sebagai wilayah multietnis memiliki potensi besar dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Dalam konteks ini, Balai Bahasa Provinsi Papua berperan strategis sebagai motor peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia, baik melalui Layanan Profesional Kebahasaan, Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), maupun Bimbingan Teknis. Upaya ini tidak hanya memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi lintas suku, tetapi juga meningkatkan mutu literasi dan kesadaran berbahasa masyarakat.

12. Potensi kerja sama dengan universitas, lembaga riset, dan mitra internasional

Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki potensi untuk berkembang sebagai pusat riset bahasa terbesar di Indonesia. Posisi ini membuka peluang untuk mengakses berbagai sumber pendanaan, seperti dana riset, hibah internasional, dan dukungan dari jejaring akademik global. Lebih jauh, potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengangkat bahasa daerah Papua ke panggung dunia melalui penelitian, publikasi, serta kerja sama internasional yang memperkuat nilai budaya dan identitas lokal di tingkat global.

1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, selain memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi kekuatan strategis, Balai Bahasa Provinsi Papua juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius untuk menjamin efektivitas program di masa mendatang. Permasalahan ini tidak hanya bersumber dari faktor internal tetapi juga faktor eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Balai Bahasa Provinsi Papua kedepannya antara lain.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur

Permasalahan utama yang dihadapi Balai Bahasa Provinsi Papua adalah keterbatasan sumber daya manusia yang jumlahnya tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah kerja yang meliputi enam provinsi. Kondisi ini menyebabkan banyak daerah terpencil belum mendapatkan layanan kebahasaan maupun literasi secara optimal. Selain itu, belum adanya Balai Bahasa definitif di lima provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat, semakin memperburuk distribusi program sehingga pelaksanaan kegiatan kebahasaan menjadi tidak merata dan cenderung terpusat di wilayah tertentu saja.

2. Keterbatasan Anggaran dan Akses Program

Permasalahan lain yang dihadapi Balai Bahasa Provinsi Papua adalah keterbatasan anggaran yang membuat jangkauan program sulit mencakup seluruh wilayah, terutama daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) yang justru sangat membutuhkan intervensi kebahasaan dan literasi. Selain itu, pemanfaatan produk kebahasaan seperti UKBI dan bahan bacaan masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan distribusi, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya akses terhadap teknologi di berbagai daerah sehingga produk-produk kebahasaan yang telah dihasilkan belum sepenuhnya memberi manfaat optimal bagi masyarakat.





3. Kesenjangan Kompetensi dan Literasi

Permasalahan berikutnya adalah masih belum meratanya peningkatan kompetensi guru utama dalam mengajarkan bahasa daerah sehingga proses pelestarian dan pengajaran bahasa belum berjalan optimal di seluruh wilayah. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya angka putus sekolah serta rendahnya kemampuan literasi dasar di sejumlah daerah di Papua, yang pada akhirnya menjadi hambatan serius bagi keberhasilan program literasi dan kebahasaan yang dijalankan Balai Bahasa.

4. Ancaman terhadap Bahasa Daerah

Permasalahan serius yang dihadapi Balai Bahasa Provinsi Papua adalah ancaman kepunahan banyak bahasa daerah akibat semakin berkurangnya jumlah penutur jati. Situasi ini semakin diperparah dengan dominasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang masuk melalui media dan ruang digital. Pengaruh tersebut membuat generasi muda cenderung lebih tertarik menggunakan bahasa asing dibanding bahasa daerahnya sendiri sehingga sikap positif terhadap bahasa ibu perlahan menurun dan mempercepat risiko hilangnya warisan bahasa di Tanah Papua.

5. Rendahnya Dukungan Pemerintah Daerah

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih adanya pemerintah daerah yang kurang memiliki komitmen dalam mendukung program kebahasaan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara perencanaan di tingkat pusat dan implementasi di daerah. Akibatnya, koordinasi antara Balai Bahasa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya belum berjalan optimal sehingga pelaksanaan program kebahasaan dan literasi sering kali tidak berkesinambungan dan kurang memberikan dampak yang merata.

6. Ketimpangan Teknologi dan Ancaman Digital

Permasalahan yang juga dihadapi Balai Bahasa Provinsi Papua adalah keterbatasan akses internet serta minimnya perangkat digital di wilayah 3T, yang menghambat upaya transformasi digital kebahasaan. Padahal, digitalisasi menjadi salah satu strategi penting dalam perlindungan dan pengembangan bahasa. Selain itu, terdapat ancaman serius berupa peretasan maupun penyebaran disinformasi yang berpotensi merusak platform digital kebahasaan. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan publik dan menghambat pemanfaatan teknologi sebagai sarana pelestarian bahasa daerah.

7. Sikap Bahasa Masyarakat yang Berubah

Permasalahan lain yang muncul adalah semakin menurunnya sikap positif sebagian masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fenomena ini terlihat dari kecenderungan penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah dalam komunikasi sehari-hari maupun media, yang berpotensi melemahkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.





BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

2.1.1 Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai Visi

**Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta
dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**

Visi ini menggambarkan bahwa Indonesia bercita-cita memiliki sistem pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, dengan dukungan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, demi mencapai kemajuan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera pada tahun 2045.

Sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendukung visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan melalui peningkatan kecakapan literasi membaca, pelestarian bahasa dan sastra daerah, pemartabatan bahasa dan sastra daerah serta penginternasionalan bahasa Indonesia.

2.1.2 Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Mengacu pada Visi Kementerian tersebut, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional bidang kebahasaan akan mengedepankan gotong-royong guna mencapai kedaulatan bahasa, bangga, mahir, maju, dan pendidikan untuk semua, Badan Bahasa menetapkan visi sesuai dengan visi Kementerian dan Presiden sebagai berikut.

**Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta
dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
melalui Bahasa dan Sastra**

2.1.3 Visi Balai Bahasa Provinsi Papua

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Bahasa Provinsi Papua memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan. Keberadaan Balai Bahasa Provinsi Papua tidak hanya menjadi garda terdepan dalam melaksanakan program pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat daerah dengan kebijakan nasional.

Sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Papua mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang dapat diakses seluruh masyarakat melalui penguatan bahasa dan sastra. Dengan





semangat gotong-royong, partisipasi semesta, serta keberagaman budaya dan bahasa di Papua, Balai Bahasa menetapkan visi sebagai berikut.

**Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta
dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
melalui Bahasa dan Sastra**

Melalui visi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Papua bertekad untuk menjadi pilar dalam membangun kedaulatan bahasa, menumbuhkan kebanggaan berbahasa Indonesia, memberdayakan bahasa daerah, dan memperkaya sastra sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi

2.2.1 Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai misi:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

2.2.2 Misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Badan Bahasa secara langsung mendukung tiga misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkaitan dengan kualitas pembelajaran, kedaulatan bahasa, dan tata kelola pendidikan. Dalam mendukung misi tersebut, Badan Bahasa memiliki misi secara lebih spesifik sebagai berikut.

1. Mewujudkan kecakapan literasi pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan;
2. Mewujudkan pemertabatan bahasa Indonesia;
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah;
4. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional; dan
5. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

2.2.3 Misi Balai Bahasa Provinsi Papua

Balai Bahasa Provinsi Papua sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turut mendukung tiga misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkaitan dengan kualitas pembelajaran, kedaulatan bahasa, dan tata kelola Pendidikan.

Selaras dengan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Papua menetapkan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan kecakapan literasi pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan di Tanah Papua;
2. Mewujudkan pemertabatan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Tanah Papua;
3. Mewujudkan perlindungan, pengembangan, dan pelestarian bahasa dan sastra daerah di Tanah Papua;





4. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional; dan
5. Mengoptimalkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Papua yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

2.3 Tujuan

2.3.1 Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Perumusan tujuan Kementerian ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut.

Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
1	Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah yang Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD 2. Angka Partisipasi Sekolah 7—18 Tahun
2	Penguatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD 2. Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional <ol style="list-style-type: none"> a. Literasi Membaca b. Numerasi 3. Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengarusutamaannya dalam Dunia Pendidikan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Kebahasaan 2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia
4	Meningkatnya Mutu Layanan dan Relevansi Pendidikan Vokasi	Persentase Angkatan Kerja Lulusan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun
5	Menguatnya Sistem Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

2.3.2 Tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa





Sesuai dengan tujuan dan indikator tujuan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Bahasa memiliki Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut

Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No.	Tujuan Badan Bahasa	Indikator Tujuan Badan Bahasa	Target Keberhasilan 2029
1	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional; Literasi Membaca	76,62
2	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan	1. Indeks Pembangunan Kebahasaan	55,01
		2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia	55,87

2.3.3 Tujuan Balai Bahasa Provinsi Papua

Balai Bahasa Provinsi Papua merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan demikian, tujuan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Papua mengacu pada sasaran program (SP) yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdapat tiga Sasaran Program sebagai berikut

(SP 1)

Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan

(SP 2)

Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia

(SP 3)

Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

Dari ketiga Sasaran Program tersebut, Balai Bahasa Provinsi Papua menetapkan seluruh Sasaran Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai tujuan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Papua.

Tujuan kegiatan harus dapat diukur ketercapaiannya pada akhir periode sehingga diperlukan penetapan indikator kinerja tujuan dalam rencana strategis. Indikator kinerja tujuan tersebut telah ditetapkan dalam





Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sebagai wujud kontribusi Balai Bahasa Provinsi Papua dalam mendukung unit eselon I mencapai sasaran program, indikator kinerja tujuan Balai Bahasa Provinsi Papua ditetapkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan
Balai Bahasa Provinsi Papua

No.	Tujuan Balai Bahasa Provinsi Papua	Indikator Kinerja Tujuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca	64	68	72	76	80
2	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
		Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	48,13	49,45	50,15	50,73	51,6
		Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89
		Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	54,42	55,14	55,86	56,58	57,29
		Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	55	55,50	56	56,50	57
		Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	1,4	2,3	3,3	4,2	5,6





No.	Tujuan Balai Bahasa Provinsi Papua	Indikator Kinerja Tujuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A	A	A	A	AA

2.4 Sasaran

2.4.1 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Sasaran strategis merupakan tujuan jangka panjang spesifik yang ditetapkan untuk mencapai kondisi masa depan yang diinginkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029, yaitu sebagai berikut.

Tabel Sasaran Strategis
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah yang Berkeadilan untuk Semua	1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD 2. Angka Partisipasi Sekolah 7—18 tahun
2	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	1. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD 2. Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. Literasi Membaca b. Numerasi c. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	1. Indeks Pembangunan Kebahasaan 2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia

2.4.2 Sasaran Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa





Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tiga sasaran program tahun 2025—2029. Secara terperinci sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel Sasaran Program
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca	64	68	72	76	80
2	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
		Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	48,13	49,45	50,15	50,73	51,6
		Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89
		Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	54,42	55,14	55,86	56,58	57,29
		Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	55	55,50	56	56,50	57
		Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	1,4	2,3	3,3	4,2	5,6





No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A	A	A	A	AA

2.4.3 Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Papua

Dalam upaya mencapai sasaran program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Papua menetapkan tujuh sasaran kegiatan tahun 2025—2029. Secara terperinci sasaran kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Sasaran Kegiatan
Balai Bahasa Provinsi Papua

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi						
SK 1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik						
IKK 1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80
IKK 1.2	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	24	30	36	42	48
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK 2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia						
IKK 2.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Persentase	41	43	45	47	49
IKK 2.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persentase	60	63	66	69	72
SK 3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan						
IKK 3.1	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persentase	59,930	63,136	66,342	69,548	72,754
IKK 3.2	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persentase	50	55	60	65	70
SK 4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra						





Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 4	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	11,55	23,10	34,66	46,21	57,76
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah						
SK 5	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra						
IKK 5.1	Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Persentase	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8
IKK 5.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:20	1:22	1:25	1:30
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK 6	Meningkatnya Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA						
IKK 6.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)	Persentase	50	55,5	56	56,5	57
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
SK 7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
IKK 7.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Papua	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK 7.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Papua minimal A	Predikat	A	A	A	A	A

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional





Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029. RPJMN Tahun 2025—2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).





2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri. Hal tersebut juga dalam rangka mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Berikut ini arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Perluasan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua yang Berkeadilan
 - a. Perluasan layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan peningkatan daya tampung dan penyediaan sarana pada satuan pendidikan baru untuk kelompok masyarakat marginal (masyarakat yang terpinggirkan, mengalami diskriminasi berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, dan politik) dan untuk peserta didik di wilayah afirmasi dengan angka partisipasi dan kemampuan fiskal rendah.
 - b. Perluasan layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan penyediaan prasarana pendidikan secara memadai dengan memperhatikan kebutuhan berbasis anak usia sekolah, serta karakteristik wilayah, dan memberikan keberpihakan pada wilayah afirmasi, wilayah yang layanan pendidikan dengan angka partisipasi dan kemampuan fiskal rendah.
 - c. Membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan karakter peserta didik.
 - d. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana layanan pendidikan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan peralatan praktik/pelatihan pendidikan vokasi yang sesuai dengan perkembangan keterampilan saat ini.
 - e. Meningkatkan peran Kemendikdasmen dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN.
 - f. Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBD seoptimal mungkin dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan prioritas pembangunan pendidikan.
 - g. Peningkatan ketepatan sasaran dan pemanfaatan bantuan pendidikan bagi anak dalam kondisi rentan, baik dari segi fisik maupun sosial-ekonomi. Anak dalam kondisi rentan mencakup anak penyandang disabilitas, anak dari keluarga prasejahtera, anak pekerja migran, atau anak dengan kondisi khusus (berdomisili di wilayah perbatasan, korban bencana, dan korban perang).





- h. Peningkatan pendampingan dan fasilitasi untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan di wilayah tertinggal dan perbatasan.
 - i. Meningkatkan pembiayaan dan kualitas pelaksanaan bantuan operasional satuan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan karakteristik kewilayahan.
 - j. Penguatan upaya penanganan anak tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat berbasis masyarakat, penjangkauan dan pendampingan efektif.
 - k. Mengembangkan mekanisme penjangkauan dan pendampingan yang efektif bagi ATS, dengan melibatkan peran aktif pendidik, pendamping sosial, dan tokoh masyarakat.
 - l. Menggalakkan Gerakan Kembali Bersekolah yang melibatkan masyarakat luas termasuk tokoh agama, adat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk membangun kesadaran dan dukungan sosial.
 - m. Membangun dan menerapkan sistem deteksi dini untuk mencegah potensi putus sekolah melalui pemantauan kehadiran peserta didik, kondisi keluarga, serta faktor risiko lainnya.
 - n. Menerapkan model pembelajaran sesuai dan fleksibel untuk ATS, dengan menyesuaikan pendekatan terhadap karakteristik dan kebutuhan khusus anak.
 - o. Peningkatan program pendidikan nonformal dan informal dalam rangka memberikan fasilitasi peningkatan kompetensi keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk kebermanfaatan maupun wirausaha.
2. Penguatan Kualitas Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Pendidikan Masyarakat
 - a. Perluasan dan penguatan mutu layanan pendidikan khusus untuk memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus.
 - b. Penguatan kualitas layanan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan regular.
 - c. Peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan dengan memperhatikan afirmasi wilayah dan kelompok usia.
 - d. Penguatan pendidikan nonformal dan informal, antara lain dengan melakukan afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, rumah belajar, relawan mengajar, dan pendidikan jarak jauh.
 - e. Peningkatan parenting, pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
 3. Penguatan Layanan PAUD dan 1 (Satu) Tahun Prasekolah
 - a. Penguatan program afirmasi untuk pemerataan kesempatan memperoleh layanan 1 (satu) tahun pendidikan anak usia dini terorganisir antara lain melalui pemenuhan layanan TK, dan TK-SD satu atap.
 - b. Menyederhanakan perizinan PAUD agar dapat mengakomodasi multilayanan berupa Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan PAUD dalam satu atap.
 - c. Melakukan integrasi kurikulum dan pendekatan pembelajaran PAUD-SD guna menyelaraskan antara capaian perkembangan pada level PAUD dan capaian pembelajaran fase awal SD.





- d. Penguatan pelaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan efektif antara lain melalui peningkatan kolaborasi berbagai pihak mulai dari orang tua/wali peserta didik, guru, Dinas Pendidikan, serta Kementerian, selain itu perlu dibangunnya aspek kemampuan fondasi sejak PAUD hingga SD kelas awal untuk bekal anak sebagai pembelajar sepanjang hayat, serta melalui penyediaan alat bantu sumber belajar bagi PAUD dan SD yang mendukung transisi PAUD ke SD.
 - e. Mendorong penerapan layanan PAUD Holistik Integratif oleh daerah, melalui penguatan kerja sama lintas sektor.
4. Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan
- a. Menerapkan strategi dan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
 - b. Penguatan pembelajaran yang mendorong penguasaan peserta didik terhadap keterampilan hidup dan soft skills masa depan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Mengembangkan pendekatan pembelajaran yang bermakna dan mendalam (*deep learning*) dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
 - d. Memberikan media pembelajaran berbasis sains dan teknologi.
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala untuk menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum dalam memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan kebutuhan peserta didik.
 - f. Meningkatkan pembinaan minat dan bakat bagi peserta didik, dan memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk pengembangan prestasi lebih lanjut, dan pemberian apresiasi untuk peserta didik berprestasi antara lain dengan fasilitasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 - g. Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
 - h. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, dengan pemanfaatan Rapor Pendidikan, penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan.
 - i. Penguatan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan.
 - j. Menerapkan asesmen nasional dan sistem penilaian pendidikan yang berkualitas untuk mengukur kualitas hasil belajar dan landasan dalam perbaikan pembelajaran dan layanan penyelenggaraan pendidikan.
5. Penguatan Pendidikan Karakter dan Manajemen Talenta
- a. Memperkuat pembelajaran yang mendorong penguatan karakter, dan memperhatikan psikososial anak, serta penciptaan lingkungan belajar peserta didik yang aman dan kondusif antara lain





dengan penguatan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas, peningkatan kompetensi guru BK dan guru agama, dan penanaman Karakter 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

- b. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam dengan menerapkan 8 (delapan) Dimensi Profil Lulusan untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik, serta memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir batin, sehingga mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat.
 - c. Melakukan revitalisasi program UKS sehingga tersedianya sanitasi dan lingkungan sekolah yang sehat guna mendukung terselenggaranya program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penerapan pendidikan gizi serta pembiasaan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat).
 - d. Pengembangan talenta peserta didik agar menjadi insan yang kreatif, inovatif, dan mandiri yang unggul dalam bidang sains dan teknologi, olah raga dan seni melalui pemetaan kebutuhan dan persediaan telenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi, pengelolaan database persediaan dan kebutuhan talenta, peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja serta pengembangan karir dan prestasi talenta, penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta, dan pembentukan Lembaga Manajemen Talenta Indonesia.
6. Penguatan Pemanfaatan Teknologi
Memperkuat pemanfaatan teknologi pendidikan untuk akselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital peserta didik dan guru.
7. Penguatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. Meningkatkan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, mendorong distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus, selain itu uji kompetensi guru perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan tingkat kompetensi guru sesuai standar kualitas.
 - b. Mendorong pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi dan numerasi, dan pendidikan karakter.
 - c. Penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan mendorong pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/D-IV)
 - d. Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis HOTS dan pendekatan pelatihan berbasis pembelajaran mendalam.
 - e. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
8. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi





- a. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi industri/swasta untuk penyesuaian kurikulum dan model pembelajaran dengan standar industri, peningkatan penyediaan pemagangan dan praktik kerja.
 - b. Memperkuat pembelajaran yang dapat mendorong pada penguasaan kewirausahaan, soft skills dan penanaman karakter kerja, dan kesiapan bekerja.
 - c. Mengembangkan model pembelajaran berkarakter/berstandar industri, seperti teaching factory/industry, dan secara selektif mengembangkan unit usaha pada satuan pendidikan yang memiliki kesiapan.
 - d. Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan vokasi melalui peningkatan dan penyegaran keterampilan (upskilling dan reskilling), serta pembelajaran, pemagangan dan kerja sama dengan industri.
 - e. Peningkatan kualitas PKK dan PKW dan mendorong kualitas layanan lembaga kursus dan pelatihan.
 - f. Mengembangkan kursus-kursus dan penguatan kewirausahaan.
 - g. Meningkatkan fasilitasi dan memperkuat sistem sertifikasi kompetensi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi.
9. Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
- a. Pelindungan bahasa dan sastra daerah melalui keberlanjutan program revitalisasi bahasa daerah (RBD), meliputi ; pengoptimalan peran pemerintah daerah; pelibatan pemangku kepentingan, komunitas dan tokoh masyarakat; mengoptimalkan infrastruktur digital, terutama teknologi kecerdasan buatan untuk pelestarian bahasa daerah; mendorong partisipasi aktif publik dan masyarakat dalam pelestarian bahasa daerah.
 - b. Pengembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia guna melestarikan sastra daerah dan memperluas pengakuan sastra Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan buku sastra, pengadaan buku sastra baru untuk berbagai jenjang usia sejak PAUD sampai dengan SMA, penguatan pembelajaran sastra dalam kurikulum dan program penulisan buku sastra baru untuk berbagai jenjang pendidikan.
 - c. Mendorong peningkatan generasi muda dan penutur bahasa untuk memperkuat kecintaan dan kompetensi generasi muda terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
 - d. Memperkuat pembinaan dan pengembangan bahasa dalam memperkuat keindonesiaan, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memperkuat bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
 - e. Penginternasionalan Bahasa Indonesia dengan peningkatan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penginternasionalan sastra Indonesia, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, serta penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia.





Secara umum, kontribusi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen dalam menopang agenda pembangunan ditampilkan dalam gambar berikut ini.

(infografis turunan UUD-RPJMN-Astacita-prioritas kebahasaan)

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Badan Bahasa dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi Kemendikdasmen. Hal tersebut juga dalam rangka mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Berikut ini arah kebijakan dan strategi Badan Bahasa.

3.3.1 Arah Kebijakan

Untuk meningkatkan literasi baca-tulis dan mewujudkan pembangunan kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan strategi Kemendikdasmen. Arah kebijakan ditujukan pada empat fokus utama, yaitu:

1. Peningkatan Kecakapan Literasi

Kecakapan literasi berhubungan erat dengan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan mengolah bahasa. Dalam meningkatkan kecakapan literasi, Badan Bahasa berupaya menumbuhkembangkan pembiasaan baca-tulis, meningkatkan kemampuan bernalar kritis, dan meningkatkan daya kreasi dan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga ranah: di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Khusus di ranah sekolah, Badan Bahasa perlu bermitra dengan ekosistem sekolah (kepala sekolah, guru, komite sekolah).

Dalam implementasinya, peningkatan kecakapan literasi mencakup produk pengayaan pendukung literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan produk pengayaan pendukung literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, misalnya kamus pelajar, karya sastra yang dialihwahkan, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa.

Masukan infografis tahapan terkait dengan Peningkatan Kecakapan Literasi

2. Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia





Pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia adalah upaya meningkatkan kedudukan, martabat, dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia serta karya sastra Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga keduanya diakui, dihargai, dan digunakan secara luas dengan penuh rasa bangga.

Masukan infografis tahapan terkait dengan pemertabatan bahasa dan sastra

3. Pelestarian Bahasa Daerah

Pelestarian bahasa daerah adalah upaya mempertahankan, menjaga, dan menghidupkan kembali bahasa-bahasa daerah agar tetap digunakan, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga tidak punah atau kehilangan fungsi sosialnya.

Masukan infografis tahapan terkait dengan Pelestarian Bahasa Daerah

4. Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

Penginternasiolan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, upaya yang ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olah raga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan, dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan.

Masukan infografis tahapan terkait dengan Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

3.3.2 Strategi Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan program kualitas pengajaran dan pembelajaran serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan, Badan Bahasa menetapkan strategi pelaksanaan program melalui platform Tim Kerja Kebahasaan dan Kesastraan. Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan Badan Bahasa, baik satker pusat maupun satker UPT, agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan pengelompokan tim kerjanya.





3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikdasmen, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2025—2029, adalah sebagai berikut.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan. 2. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir. 3. Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk pemutakhiran layanan UKBI yang saat ini dilaksanakan secara daring. 	Pusbin	Oktober 2025
2.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa. 2. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional dan regional, membantu pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya indeks ini, kebijakan kebahasaan dapat lebih akurat, strategis, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia. 3. Selain itu, Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa dalam pembangunan nasional. 	Sekretariat	Desember 2025
3.	Rancangan Peraturan Presiden	Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia	Pusdaya	Desember 2025





No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
4.	Rancangan Peraturan Presiden	Rencana Induk dan Peta Jalan Terpadu Gerakan Literasi	Pusbin	Mei 2026
5.	Rancangan Peraturan Presiden	Peta Jalan Pewarisan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Pusbanglin	Oktober 2026

3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikdasmen sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar Kemendikdasmen dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Kerangka kelembagaan ini diharapkan dapat memastikan penataan organisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis, serta meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui struktur organisasi yang tepat, proses organisasi yang efisien, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

3.6 Reformasi Birokrasi

